

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)

**Melina marcori ludani
Gustaf budi tampi
Jericho pombengi**

ABSTRACT: *Accountability can live and thrive in a transparent and democratic atmosphere and the freedom to express opinions. And then, the government should really be aware the government and the public service is something can not be separated from the public. The realization of the region 's financial accountability will be the initial basis for governance better and all financial accountability that comes from public funds going smoothly as public confidence in the government in the field of financial management.*

This research used descriptive research through in-depth interviews to 23 informants, the data collection techniques using of observation, interviews and documentation. The result Accountability system is one of the crucial points of the implementation of the regional administration. Accountability system is a systematic and continuous process for assessing the success or failure of governance and development activities in accordance with the policies, programs, goals, and objectives that had set in realizing the vision of the district as government of Banggai Islands set out in Medium Term Development Plan (RPJMD).

The Conclusion is Local governments is very trying to account for funds from the public for development and welfare of the communities in district of Banggai islands..

Keywords: *Accountability, Local Financial Management*

PENDAHULUAN

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan *public goods* dan

public services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. (Sedarmayanti, 2012)

Reformasi sektor publik tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai (Mardiasmo 2002).

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut,

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN (Sedarmayanti, 2012).

Para ahli juga sepakat bahwa untuk membangun *good governance* harus ada *clean government* artinya pemerintah yang harus bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tanpa adanya pemberantasan KKN, konsep *good governance* tidak mungkin dapat diwujudkan. Suhadak (dalam Jurnal Administrasi Publik) mengatakan bahwa masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perubahan tersebut antara

lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu bagian pemerintahan yang mengelola sumber daya daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah diatur. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Masalah yang seringkali terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan tidak jelas lingkup dan penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: *verifiability*, *responsibility*, dan *answerability*. Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara eksternal. Dan juga kecenderungan bahwa konsep akuntabilitas masih cenderung menekankan pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (*elected officials*). Kurang

menekankan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan judul : **Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)**

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Pasolong, 2012).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong : 2007).

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk mengetahui akuntabilitas tersebut, maka akan digunakan konsep yang dikemukakan oleh J. B. Gharthey(dalam Sedarmayanti, 2012:68) yang mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawababan berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya?

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,

(3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005).

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang terdiri dari:

- | | | |
|---------------------|------|-------|
| 1. Sekertaris Dinas | : 1 | orang |
| 2. Kepala Bidang | : 1 | orang |
| 3. Pegawai | : 6 | orang |
| 4. Masyarakat | : 15 | orang |

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian nanti, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui:

1. Menggunakan observasi

Adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasolong 2012).

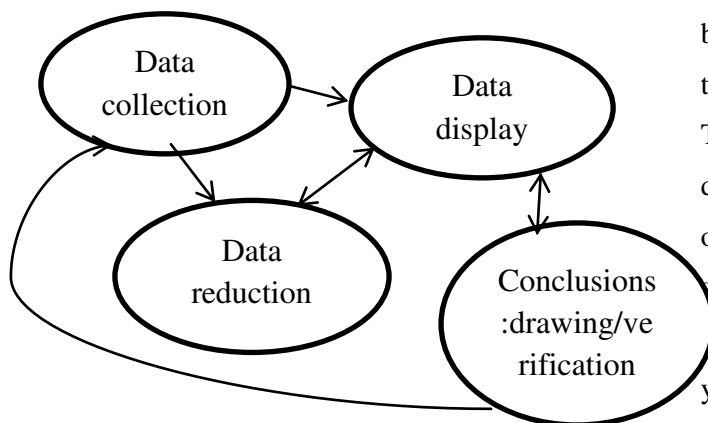
2. Menggunakan wawancara

Adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung (Pasolong 2012).


3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiono, 2010). Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2010), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut:



1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti  merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik .

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui akuntabilitas tersebut, maka akan digunakan konsep yang dikemukakan oleh J. B. Ghartey yang

mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawababan berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya. Yang akan di uraikan sebagai berikut:

1. Apa yang Harus Dipertanggungjawabkan

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat baik itu dana dari pajak dan retribusi daerah. Dari hasil penelitian yang ada yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur, pembangunan di sector pertanian, kalautan dan perikanan. Sebelum pemda melaksanakan suatu program, pemda terlebih dahulu melakukan debat melalui perencanaan program musrembang pada setiap kecamatan. Dalam pelaksanaan musrembang tersebut, hanya dihadiri oleh pemerintah desa dan juga utusan dari beberapa masyarakat. utusan dari setiap desa yang ada mamaparkan beberapa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Kemudian pemerintah daerah memilih salah satu program prioritas dari setiap desa untuk dilaksanakan. Dengan demikian bentuk

pertanggungjawaban pemda tergantung pada keputusan pada saat dilaksanakannya musrembang.

2. Mengapa Pertanggungjawaban Harus Diserahkan

Sistem pertanggungjawaban merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Sistem pertanggungjawaaban adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun. Adapun manfaat dibuatnya Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat diper- tanggungjawabkan kepada masyarakat

3. Siapa yang Bertanggungjawab terhadap Berbagai Bagian Kegiatan dalam Masyarakat

Pemerintah daerah bertanggungjawab dan terlibat langsung atas pelaksanaan program yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang ada membutuhkan koordinasi yang baik antara dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut dan juga membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan program yang ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari masyarakat yang ada. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa dalam pelaksanaan program yang ada sudah sesuai dengan harapan setiap masyarakat. Karena setiap program yang akan dilaksanakan selalu mengacu pada permintaan dari masyarakat yang dilakukan pada saat pelaksanaan musrembang di setiap kecamatan. Dalam proses pelaksanaan

program tersebut pemerintah daerah selalu berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat merasa puas atas setiap pelayanan yang diberikan.

4. Pertanggungjawaban Berjalan Seiring dengan Kewenangan yang Memadai

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas *performance-based budgeting*. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak terkait untuk melaksanakan upaya menyeluruh

memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah lama dilaksanakan. Berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik memang belum mencapai kestabilan yang sempurna. Namun, terlihat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan kemajuan signifikan membaiknya opini audit BPK selama ini, tentu merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah

Hasil penelitian yang ada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai bagus. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara berturut-turut mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jadi dalam akuntansi WTP itu sudah yang paling baik dalam system Pengelolaan Keuangan. Namun kalau melihat pada sisi masyarakat Pertanggungjawaban yang diberikan pemda kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, karena pelaksanaan program yang ada tidak dilaksanakan secara menyeluruh, hanya melihat beberapa pihak saja atau desa-desa tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemerintah daerah sudah sangat berusaha dalam mempertanggung jawabkandana dari masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah kabupaten Banggai kepulauan.
2. Pertanggungjawaban diserahkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dana yang ada dikelola untuk apa dan juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
3. Kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan program yang ada di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran:

1. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan lagi kinerja untuk pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Masyarakat harus ikut serta dalam setiap pelaksanaan program yang ada, agar pelaksanaan program yang ada bisa berjalan dengan baik dan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lebih baik.
4. Pemerintah daerah harus lebih mengutamakan kepentingan atau kesejahteraan masyarakat dari pada kepentingan politik untuk pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, L, J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif* : Remaja Karya, Bandung.

Pasolong, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*: Alfabeta, Bandung.

Sedarmayanti, 2012, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Pertama*, Edisi Revisi: Mandar Maju, Bandung.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Alfabeta, Bandung.

Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*: Prenada Media, Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah